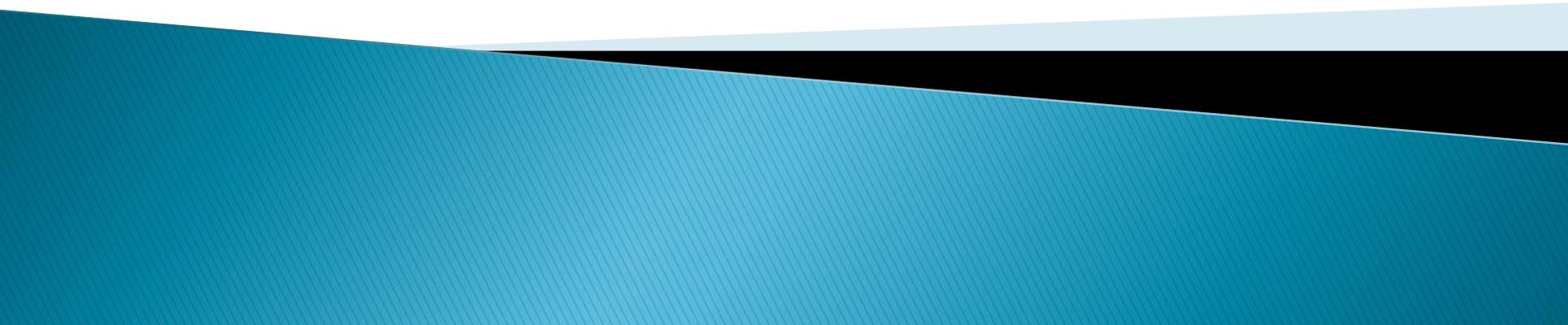


ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI GENERASI IV

DR. NOVITA TRESIANA



- ▶ Agenda
 - ▶ ▪ Teori Generasi I
 - ▶ ▪ Teori Generasi II
 - ▶ ▪ Teori Generasi III
 - ▶ ▪ Teori Generasi IV
- 

GENERASI I

- ▶ Menerangkan bagaimana outcomes implementasi kebijakan publik pada suatu daerah tertentu dengan suatu kasus tertentu.
 - ▶ Belum memperhatikan variabel apa yang mempengaruhi implementasi.
 - ▶ Tokoh >> Eugene Bardach
- 

CONTOH

□ Kebijakan/Program Konversi minyak tanah ke gas elpiji

□ Kebijakan
sasaran
tujuan

Hasil

% masy.

yg melaku-

kan kon-

versi

Dampak

-Efisiensi

penge-

luaran

-Kebersi-

han

GENERASI II

- ▶ Menjelaskan bagaimana dengan menggunakan kerangka teori, yaitu variabel apa yang menyebabkan adanya perbedaan antara output dengan objectives dan antara outcome dengan goals.
- ▶ ▪ Telah ditelusuri variabel2 apa yg menyebabkan perbedaan antara objectives dgn outputs dangoals dengan outcomes

TOKOH GENERASI II

- ▶ Edward C. III
 - ▶ ▪ Mazmanian dan Sabatier
 - ▶ ▪ Marlee S. Grindle
- 

Contoh kebijakan Pos Yandu

- Variable yg mempengaruhi :
- 1. Organisasi : Org. ciptaan masy.
vs ciptaan pemerintah.

Kesimpulan : Org. ciptaan masy. lebih berhasil menjalankan pos yandu daripada org. ciptaan pemerintah.

- 2. Lingkungan : Pedesaan vs Perkotaan
Kesimpulan : Lingk. dgn masy. yg satu lebih berhasil.

Kerangka Teorinya : KI Pos Yandu dipengaruhi oleh org. dan kondisi lingkungan



Diagram Hubungan



HIPOTESIS

□ H1 : Di daerah yg org. PY diciptakan LSM lebih berhasil daripada ciptaan pemerintah.

H2 : PY perkotaan kurang berhasil daripada pedesaan

Operasionalisasi hipotesis di atas dilakukan melalui penelitian studi perbandingan.

METODOLOGI

- Metode perbandingan/perbedaan yg digunakan adalah dengan menghitung rata2 (*method of difference*)
- Cara pembuktian :
minimal kita harus membandingkan kinerja implementasi pada 2 daerah yang sengaja dipilih, yaitu 1 desa yang maju sekali dan yang terbelakang.

JUSTIFIKASI

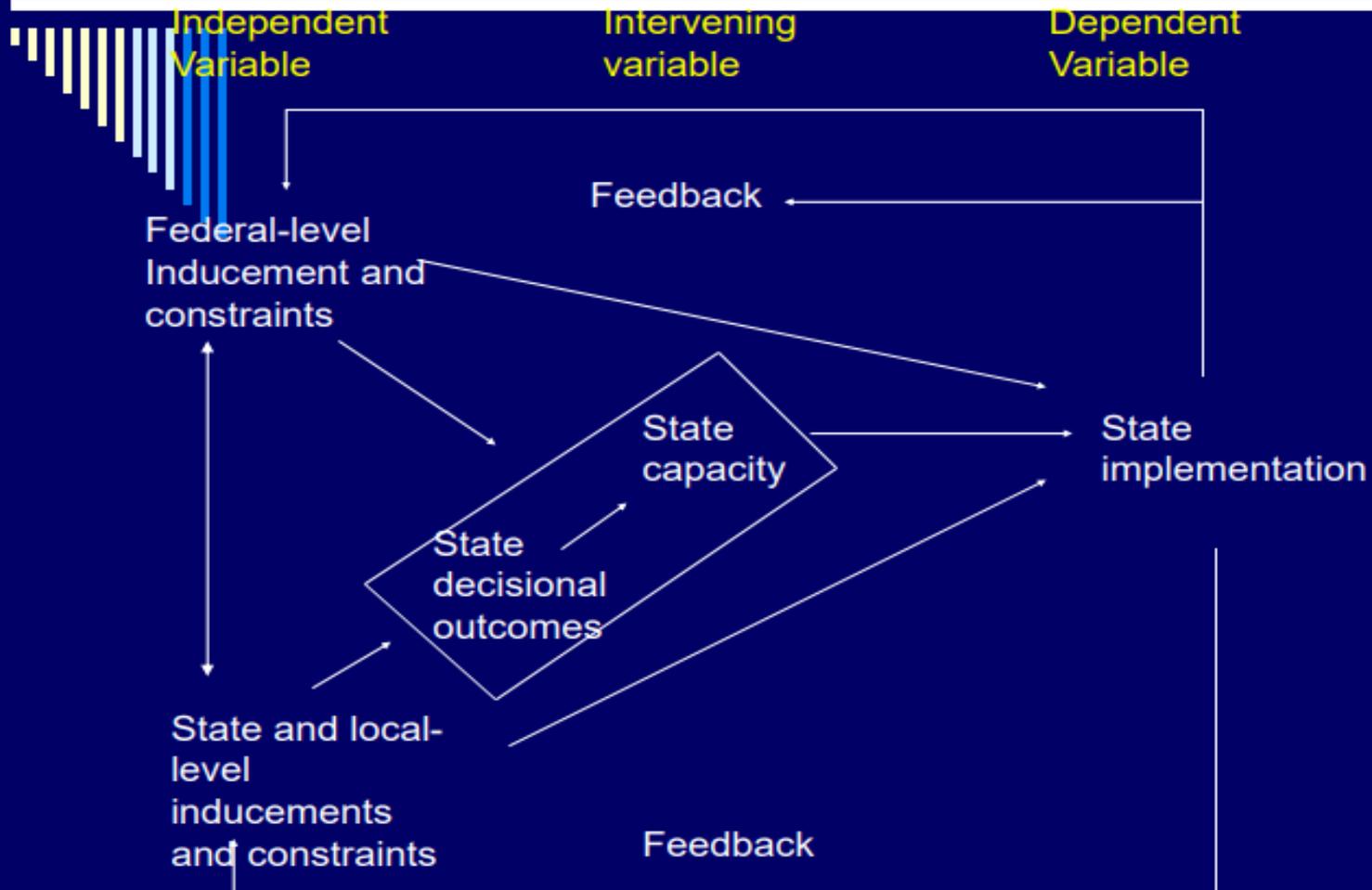
- ▶ Untuk melihat % kita harus memilih sekelompok PY yang diciptakan oleh masy. dan ciptaan pemerintah, kemudian diambil rata2 kinerja implementasi.

TEORI GENERASI III

- ▶ Lebih maju dibandingkan dengan 2 teori sebelumnya. • Teori Generasi III mencoba menghubungkan Independent Variable dengan Dependent Variable. • Dijelaskan pula bagaimana proses hubungan itu terjadi
- 

PERBEDAAN DENGAN TG II

- ▶ Pada TG II, dalam kasus Pos Yandu, kitahanya dapat mengatakan bahwa, "baik buruknya KI ditentukan oleh organisasi dan lingkungan."
 - ▶ Kita tidak dapat mengatakan/menjelaskan bagaimana organisasi dan lingkungan dapat mempengaruhi KI.
 - ▶ Pengaruh itu hanya dapat dijelaskan pada TG III.
- 





Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial

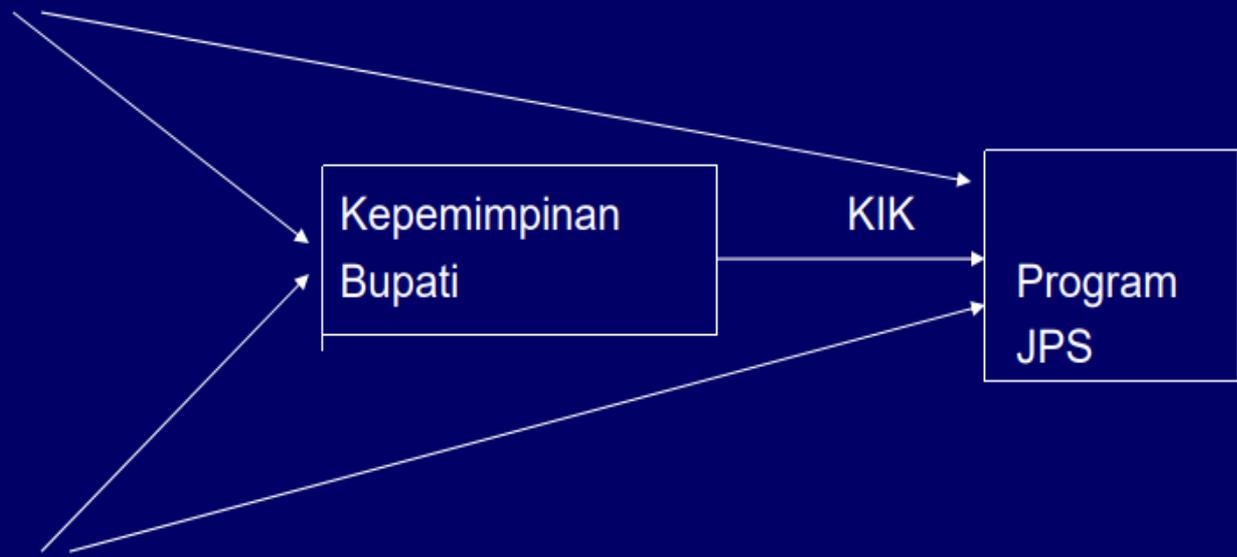
Daerah Kabupaten
Deli Serdang

Kepemimpinan
Bupati

KIK

Program
JPS

Daerah Kabupaten
Simalungun



TEORI GENERASI KE-4

□ **Teori Kontingensi.** Teori ini dikembangkan oleh James Lester yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor 1). **Komitmen** dan 2) **kapasitas pemerintah** (daerah). Berdasarkan dua faktor tersebut pemda dapat dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan tingkat keberhasilan implementasi yang dilaksanakannya.

Contingency Theory

	Kapasitas Pemerintah Daerah	
Komitmen Pemerintah Daerah	Tinggi	Rendah
Tinggi	Progresive	Struggler
Rendah	Delayer	Regressive

- *Ambiguity conflict model*. Teori ini dikembangkan oleh Richard Matland didasarkan pada ambiguitas dan konflik yang muncul dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pada dua variabel pokok tersebut menurutnya tipologi implementasi dapat dibedakan menjadi empat jenis.

Ambiguity and Conflict Theory

Ambiguity	Conflict	
	Low	High
Low	Administrative implementation	Political Implementation
High	Experimental Implementation	Symbolic Implementation



- ▶ Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. Pemikiran Matland dikembangkan lebih rinci sebagai berikut:

- *Trust and involvement theory*. Teori ini dikembangkan oleh Denise Scheberle yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan keterlibatan para aktor dalam implementasi

Trust and Involvement Theory

	Involvement	
Trust	High	Low
High	Pulling together	Cooperative but autonomous
Low	Coming apart and contentious	Coming apart and avoidance

GENERASI DLM STUDI IMPLEMENTASI

GENERASI I

GENERASI II

GENERASI III

GENERASI IV

GENERASI I

1. **Penelitian generasi pertama, fokus :**
 - a. Bagaimana suatu aturan diwujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program
 - b. Upaya menunjukkan sifat kekomplekan dan dinamika implementasi
 - c. menekankan pentingnya subsistem kebijakan
 - d. Mengidentifikasi faktor yg berhub dg hasil suatu program
 - e. mendiagnosis bbrp penyakit yg sering mengganggu pelaksana

GENERASI II, Fokus :

- 1. Jenis dan isi kebijakan**
- 2. organisasi pelaksana dan sumberdaya**
- 3. pelaksana kebijakan : sikap, motivasi, hub antar pribadi, komunikasi dsb**
- 4. Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yg muncul dsb**

GENERASI III, fokus :

- 1. Komunikasi antar lembaga pemerintahan**
- 2. penyusunan desain penelitian**
- 3. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi**

Beberapa model Implementasi (Parsons, 1997)

MODEL ANALISIS KEGAGALAN ,
(implementasi sbg proses interaksi
antara tujuan dan tindakan(Pressman &
Wildavsky, 1973), implementasi sebagai
politik adaptasi saling menguntungkan (Mc Laughin, 1975)

MODEL TOP DOWN : mengidentifikasi
faktor yang menyebabkan keberhasilan
implementasi (Van Meter van Hoirn
(1975), Grindle (1980), Sabatier &
Mazmanian (1979) dsb

MODEL IMPLEMENTASI

MODEL BOTTOM UP : mengidentifikasi
faktor lain dan interaksi organisasi
antara Pemerintah dg warga negara
(lipsky, 1971), Implementasi sebagai
proses yg disusun melalui konflik dan
bergaining (Wetherly, 1977),
Implementasi sebagai proses alur (Smith,
1973)

MODEL SINTESIS : Ripley & Franklin
(1985), Nakamura & Smallwood
(1986) dsb

MODEL IMPLEMENTASI TOP-DOWN

**LOGIKA BERFIKIR DARI ATAS (PIMPINAN-
BAWAHAN/KEBIJAKAN-PELAKSANAAN LAPANG)**

**COMMAND AND CONTROL : PIMPINAN
MENERJEMAHKAN&MENGAWASI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DI LAPANGAN :
SESUAI DENGAN COMMAND (PERINTAH)**

KEGIATAN PENELITIAN IMPLEMENTASI TOP-DOWN

- ❑ Memilih kebijakan yang akan di kaji
- ❑ Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan
- ❑ Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk capai tujuan dan sasaran kebijakan

LANJUTAN

- ❑ Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai SOP yang ada)
- ❑ Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.

LANJUTAN

- ❑ Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.
- ❑ Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROYEK KEMISKINAN PERKOTAAN

KEBIJAKAN /PROGRAM

- TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DENGAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN&KEMANDIRIAN DGN **KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DAN PERBAIKAN KONDISI LINGKUNGAN** MELALUI PROGRAM : **KREDIT MODAL, HIBAH DAN PELATIHAN**

LANJUTAN

OUTCOME

- **CAKUPAN KELUARGA MISKIN YG DPT KREDIT & PELATIHAN**
- **AKSESIBILITAS KAUM MISKIN THD MODAL**
- **KEMAMPUAN MENJAGA LINGKUNGAN**

LANJUTAN

**INITIAL
OUTCOME**

- **PENINGKATAN
KETRAMPILAN**
- **PENINGKATAN
MODAL KERJA**
- **PERBAIKAN
KONDISI
LINGKUNGAN**

LANJUTAN

**INTERMEDIATE
OUTCOME**

- **PENINGKATAN
PENDAPATAN**
- **PENINGKATAN
NILAI JUAL ASET
TANAH DAN
RUMAH**

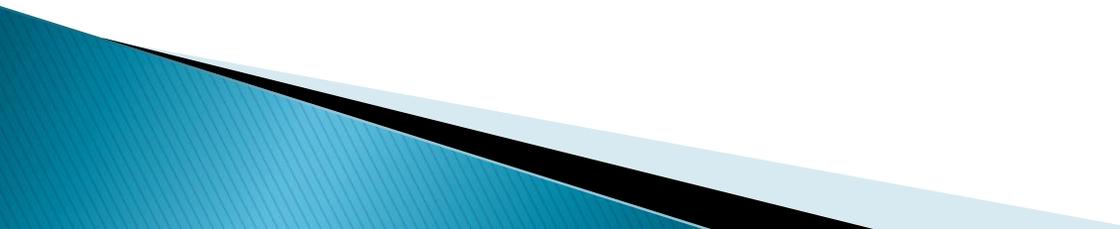
LANJUTAN

**LONGTERM
OUTCOME**

**• PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN**

CARA TERBAIK DLM MENJALANKAN KEBIJAKAN MODEL TOP-DOWN

MODEL-MODEL IMPLEMENTASI TOP-DOWN

- ❑ Donalds Van meter & Carl E. Van Horn
 - ❑ George C Edwards III
 - ❑ Merilee Grindle
 - ❑ Daniel H Mazmanian & Paul Sabatier
- 

Model Van Meter & Van Horn



Model Van Meter & Van Horn

- ▶ **Studi Implementasi** hakikatnya mrpk penilaian atas kinerja kebijakan
- ▶ **Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh :**
 - ▶ **1. Standard** (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan. Ini berkaitan dg sejauhmana standard direalisasikan, sebab : sering telalu luas dan kabur, shg susah diukur
 - ▶ **2. Sumber- sumber Kebijakan :** Dana SDM, Fasilitas
 - ▶ **3. Komunikasi antar organisasi & keg pelaksanaan**, khususnya mengkomunikasikan standard aturan, shg diperoleh ketepatan dan konistensi sekaligus ebagai alat ukur dalam pengawasan
 - ▶ **4. Karakteristik badan pelaksana :** menyangkut karakteristik, norma dan pola hub yang ada.
 - Dalam hal ini yg harus dicermati adalah :
 - a. kompetensi dan jumlah staff
 - b. Rentang kendali (hierarki)
 - c. Dukungan politik yg dimiliki
 - d. Kekuatan organisasi
 - e. Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi
 - f. Keterkaitan dg pembuat kebijakan
 - ▶ **5. Kondisi sosial ekonomi dan politik**
 - ▶ **6. Sikap pelaksana**, meliputi persepsi pelaksana atas masalah, tandard dan tujuan serta sejauhmana bertentangan dg kepentingan pelaksana

Model G. Edwards III

MENJELASKAN :

- 1. Prakondisi apa yg diperlukan agar implementasi berhasil**
- 2. Hambatan utama yg menyebabkan implementasi gagal**

ADA 4 VARIABEL DLM IMPLEMENTASI:

- 1. Komunikasi**
 - 2. Sumber-sumber**
 - 3. Sikap pelaksana**
 - 4. Struktur Birokrasi**
- 

Model G. Edwards III

KOMUNIKASI

- Setiap pelaksana harus memahami apa yg dilakukan
- pelaksana harus memahami juklak
- Pelaksana hrs konsisten pada juklak
- Sering ditemukan hambatan dalam penyampaian inf pd hierarkhi orgs yg berlapis-lapis
- Semakin baik komunikasi akan semakin baik implementasi
- Mengurangi distori informasi
- transparansi

Model G. Edwards III

SUMBER- SUMBER

- Staff yg memadai dan berkeahlian sesuai kebutuhan
- Informasi tentang kebijakan
- Wewenang yg dimiliki pelaksana
- Fasilitas yg ada

Model G. Edwards III

**SIKAP
PELAKSANA**

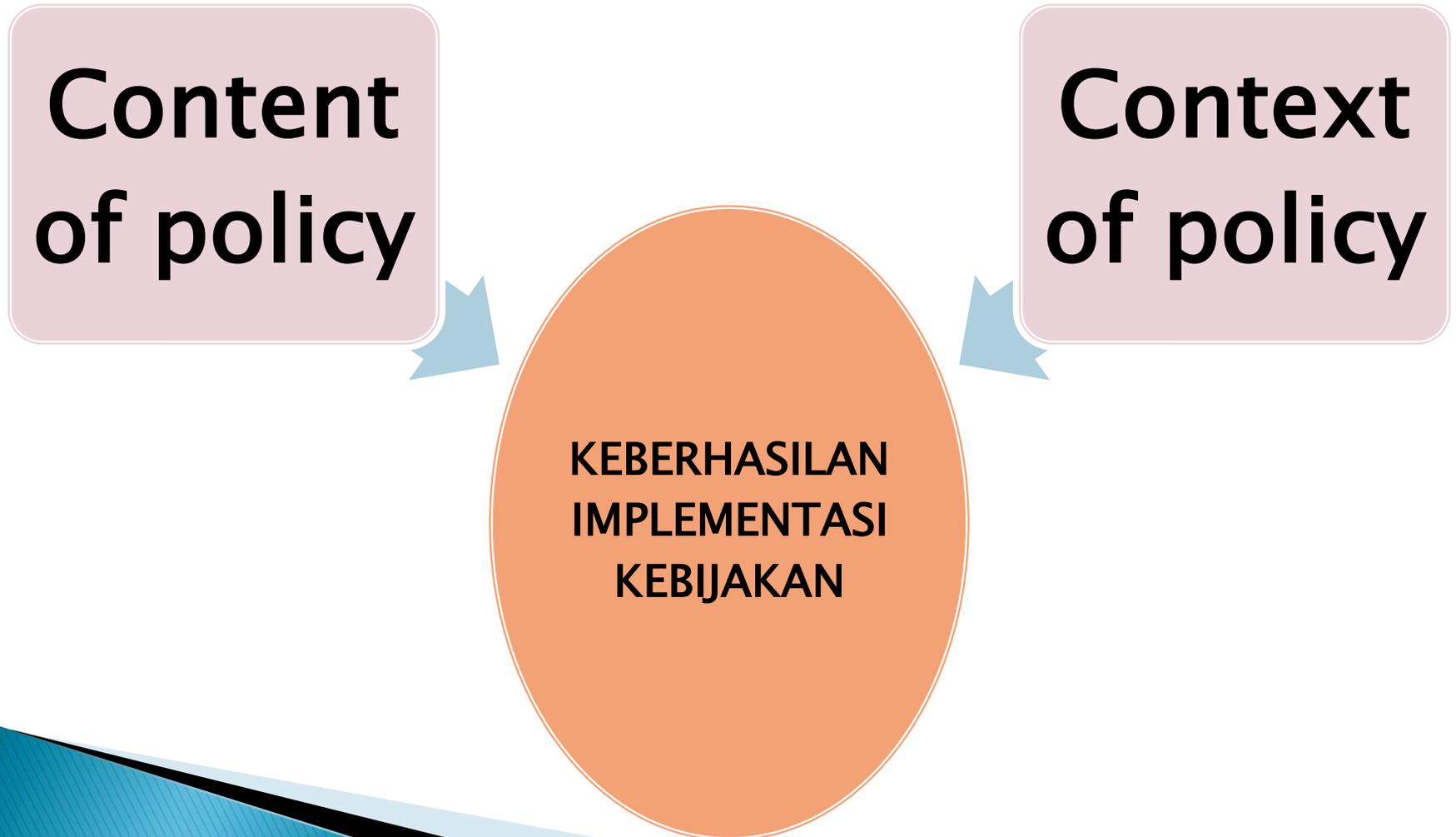
- **SIKAP DAN
DUKUNGAN APARAT
PELAKSANA**
- **PRILAKU BIROKRASI**

Model G. Edwards III

STRUKTUR BIROKRASI

- PROSEDUR
KERJA&UKURAN
DASARNYA
- Hierarkhis struktur
organisasi
- Koordinasi,
desentralisasi,
kewenangan

Model Grindle



Grindle (lanjutan)

CONTENT OF POLICY :

- 1) **kepentingan yg dipengaruhi: Semakin banyak semakin sulit diimplementasikan.**
- 2) **Jenis manfaat yg diperoleh: Kebijakan yg memberi manfaat aktual dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah diimplementasikan**
- 3) **Derajat perubahan yg diinginkan; Perubahan sikap dan perilaku akan sulit dilakukan**
- 4) **Kedudukan/ posisi pembuat kebijakan.**
- 5) **Siapa pelaksana program**
- 6) **Sumber daya yg dikerahkan**

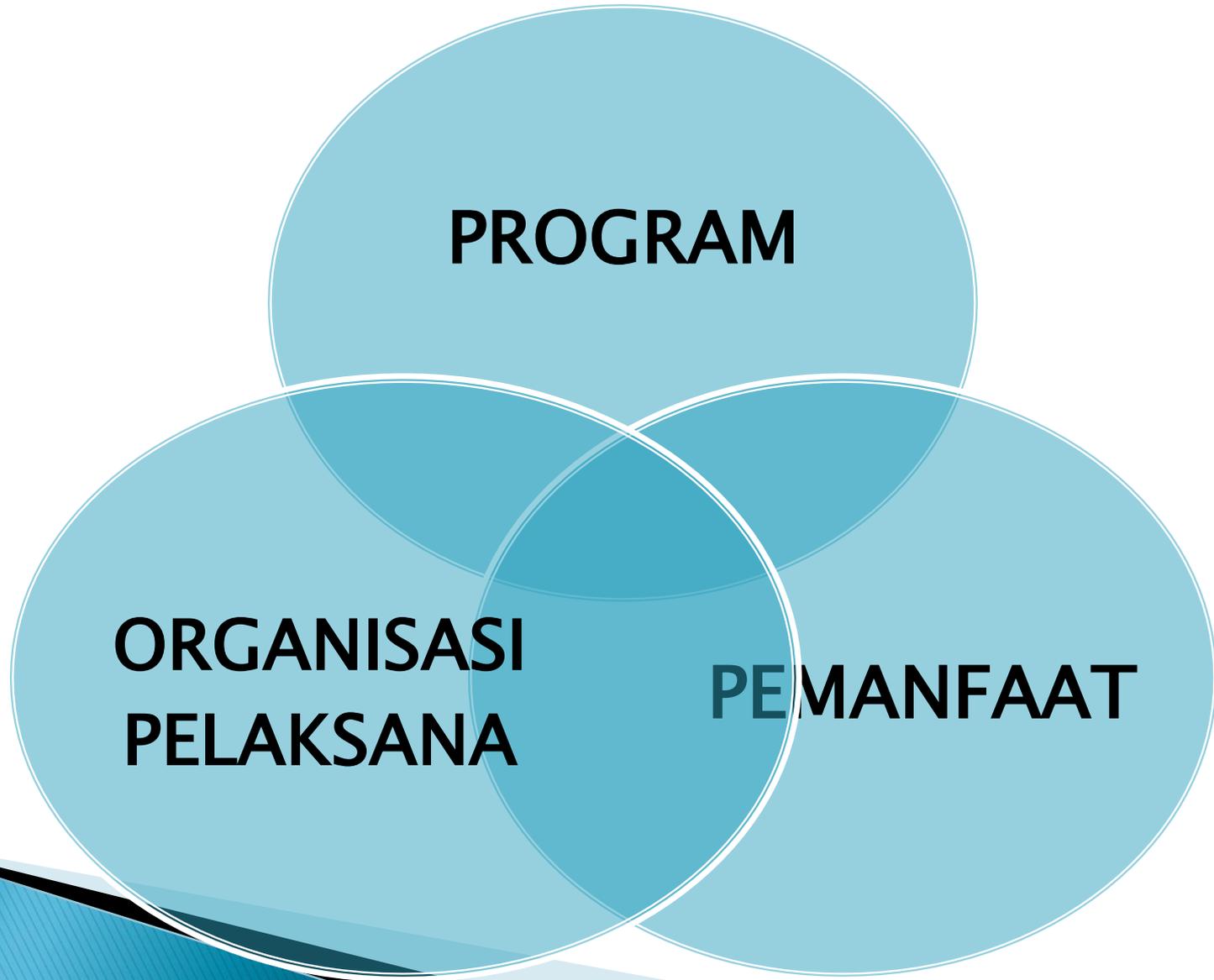
Context of policy

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

MODEL Ripley dan Franklin



MODEL KORTEN & SYAHRIR



Model Sabatier & Mazmanian



A. mudah/tidaknya masalah dikendalikan:

- Kesukaran-kesukaran teknis & keragaman perilaku kelompok sasaran
- Persentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk
- Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

B. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi :

- Kejelasan & konsistensi tujuan
- Digunakannya teori kausal yang memadai
- Ketepatan alokasi sumber dana
- Keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
- Aturan keputusan dari badan pelaksana
- Rekrutmen pejabat pelaksana
- Akses formal pihak luar

C. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi:

- Kondisi sosio-ekonomi & teknologi
- Dukungan publik
- Sikap & sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
- Dukungan dari pejabat atasan
- Komitmen & kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

D. Tahap-tahap dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung):

Output kebijakan badan pelaksana -->

Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan-->

Dampak nyata output kebijakan ----->

Dampak output kebijakan sebagai dipersepsi----->

Perbaikan mendasar dalam undang-undang

Model Sabatier & Mazmanian

Implementasi mrpk fungsi 3 variabel :

- ▶ **1. Karakteristik Masalah**, yg meliputi :
 - ▶ – Ketersediaan teknologi & teori teknis
 - ▶ – keragaman perilaku sasaran
 - ▶ – Sifat Populasi
 - ▶ – Derajat perubahan perilaku yg diharapkan

Sabatier & Mazmanian(lanjutan)

- ▶ **2. Struktur manajemen program** (aturan yang mengoperasionalkan kebijakan), meliputi:
 - Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - Teori kausal yg memadai
 - Sumber dana yg mencukupi
 - Integrasi organisasi pelaksana
 - Diskresi Pelaksana
 - Rekrutmen pejabat pelaksana
 - Akses formal pelaksana ke organisasi lain

3. Faktor diluar Peraturan, meliputi :

- ▶ – Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi
 - ▶ – Perhatian pers thd masalah kebijakan
 - ▶ – Dukungan publik
 - ▶ – Sikap dan sumber daya kel. Sasaran
 - ▶ – Dukungan kewenangan
 - ▶ – komitmen dan kemampuan pej pelaks
- 

- ▶ Menurut model top down, jika semua variabel dapat bekerja dg baik maka proses implementasi berjalan seperti yg diharapkan.
 - ▶ Variabel tsb dapat bersumber dari :
 - program itu sendiri
 - pelaksana
 - sasaran kebijakan
 - lingkungan kebijakan
- 

MODEL IMPLEMENTASI BOTTOM UP

KRITIK TERHADAP TOP DOWN

PERTAMA :

Menganggap bahwa aktor utama yang paling berpengaruh dalam implementasi adalah policy maker, sehingga mereka lupa bawa keberhasilan dan kegagalan implementasi dapat dipengaruhi oleh aktor-aktor lain, yaitu birokrat garda depan, kelompok sasaran, sector swasta dan lain-lain.

KEDUA :

Pendekatan top down sulit diterapkan ketika tidak ada kebijakan/aktor yang dominan (kebijakan melibatkan pemerintah, swasta dan internasional, contoh program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Erupsi Merapi).

KETIGA :

- ▶ Pendekatan top down melupakan kenyataan bahwa birokrat garda depan dan kelompok sasaran cenderung untuk menyelewengkan arah kebijakan bagi kepentingan masing-masing.

FOKUS PENDEKATAN BOTTOM

Jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level.

Motif ekonomi politik para aktor yang terlibat dalam implementasi

FOKUS
KEBERHASILAN
IMPLEMENTASI

```
graph TD; A[Jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level.] --> B((FOKUS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI)); C[Motif ekonomi politik para aktor yang terlibat dalam implementasi] --> B;
```

2 ASPEK PENTING DLM IMPLEMENTASI BOTTOM UP

Birokrat pada level bawah (street level bureaucrat)

- POSISI KUNCI DLM IMPLEMENTASI
- MEREALISASIKAN POLICY OUTPUT PADA KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran (target group).

- KETERLIBATAN DLM PERUMUSAN
- KETERLIBATAN DLM PELAKSANAAN

Kapan digunakan model top down & bottom up ?

- ▶ Model top down akan menguntungkan pada sebuah situasi dimana para pembuat kebijakan mampu mengatur dan mengontrol situasi, dan dana yg terbatas
- ▶ Model Bottom up, menguntungkan pada situasi dimana implementator mempunyai kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa ada dependensi kekuasaan dengan melihat dinamika daerah atau lingkungan kebijakan yg berbeda
- ▶ Menurut Eric Lane (1995) model topdown menekankan tanggung jawab, sementara bottom up menekankan pada kepercayaan

UKURAN/PARAMETER KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PERSPEKTIF KEPATUHAN & KEAKTUALAN

PERTAMA : KEPATUHAN implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan

KEDUA : KEMAMPUAN implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

PERSPEKTIF PROSES

**IMPLEMENTATOR SESUAI DGN PETUNJK
DAN PELAKSANAAN YG DIBUAT OLEH
PEMBUAT PROGRAM YG MELIPUTI :**

- 1) tata cara atau prosedur pelaksanaan (SOP)**
- 2) agen pelaksana,**
- 3) kelompok sasaran dan manfaat program.**

PERSPEKTIF HASIL

- ❑ Program membawa **DAMPAK** seperti yang diinginkan.
- ❑ **ADA** konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

PERSPEKTIF MODEL LINEAR

**DIKOTOMI
PERUMUS-
PELAKSANA**

- PERUMUSAN FASE PENTING
- IMPLEMENTASI DISERAHKAN PADA KELOMPOK/ORGANISASI LAIN DI LUAR PERUMUS

**KUNCI
KEBERHASILAN**

- IMPLEMENTATOR
- PERUBAHANAN PADA ASPEK MANAJEMEN DAN KAPASITAS PELAKSANAAN

MODEL INTERAKTIF

**PENGUSULAN
PERUBAHAN
PROSES
IMPLEMENTASI**

- **KEBIJAKAN DIANGGAP
TIDAK MEMENUHI
HARAPAN STAKEHOLDERS
(TIPOLOGI IMPLEMENTASI)**

**EVALUASI SETIAP
TAHAPAN
IMPLEMENTASI**

- **INPUT**
- **PROSES**
- **OUTPUT**

**FAKTOR-FAKTOR
PENENTU
BERHASIL/TIDAKNYA
SEBUAH PROSES
IMPLEMENTASI**



PEMETAAN KEGAGALAN/KEBERHASILAN DLM PROSES IMPLEMENTASI

KUALITAS KEBIJAKAN ITU SENDIRI

- Kejelasan tujuan
- Kejelasan Implementator
- Proses perumusan kebijakan itu sendiri

KECUKUPAN INPUT KEBIJAKAN (TERUTAMA ANGGARAN)

- Besar anggaran yang menunjukkan seberapa besar political will

PEMETAAN KEGAGALAN/KEBERHASILAN DLM PROSES IMPLEMENTASI

**KETEPATAN
INSTRUMEN YG
DIPAKAI UTK
CAPAI TUJUAN
KEBIJAKAN**

- Apakah instrumen berupa PELAYANAN, HIBAH, SUBSIDI, TRANSFER sudah tepat utk capai tujuan kebijakan

**KAPASITAS
IMPLEMENT
ATOR**

- Struktur organisasi
- Dukungan SDM
- Koordinasi
- Pengawasan

PEMETAAN KEGAGALAN/KEBERHASILAN DLM PROSES IMPLEMENTASI

KARAKTERISTIK & DUKUNGAN KELOMPOK SASARAN

- Karakteristik kelompok sasaran
(individu /kelompok,
laki-laki/perempuan)

KONDISI LINGKUNGAN GEOGRAFI, SOSIAL, EKONOMI, POLITIK DIMANA IMPLEMENTASI DILAKUKAN

- Kondisi yang kondusif

PENYEBAB KEGAGALAN IMPLEMENTASI (HASIL PENELITIAN)

- 1) SOSIALISASI YANG KURANG BAIK**
- 2) MASYARAKAT TIDAK DILIBATKAN
DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN SEHINGGA
DUKUNGANNYA RENDAH**
- 3) KORUPSI**
- 4) MONITORING/PENGAWASAN
YANG TIDAK BERJALA BAIK**

GOGGIN et.al (1990), KEGAGALAN IMPLEMENTASI PEM DAERAH

ISI KEBIJAKAN

- SUMBERDAYA
- MANFAAT KEBIJAKAN
- KETERLIBATAN PUBLIK

FORMAT KEBIJAKAN

- KEJELASAN KEBIJAKAN
- KONSISTENSI KEBIJAKAN
- FREKUENSI DAN PENERIMAAN ISI KEBIJAKAN

REPUTASI AKTOR PELAKSANA

LEGITIMASI DAN KREDIBILITAS PEMDA

**Goggin et,al (1990) :
Tipologi /variasi implementasi**

PENYIMPANGAN (DEFIANCE)

- **DIWARNAI PENGUNDURAN/PEMBATALAN IMPLEMENTASI OLEH IMPLEMENTER YG DISERTAI PERUBAHAN TUJUAN, KELOMPOK SASARAN, MEKANISME IMPLEMENTASI YG BERAKITA TDK TERCAPAINYA TUJUAN**

PENUNDAAN (DELAY)

- **PENUNDAAN TANPA MODIFIKASI, DIMANA IMPLEMENTER MENUNDA PELAKSANAAN IMPLEMENTASI, NAMUN TDK MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP ISI KEBIJAKAN**

PENUNDAAN STRATEGIS

- **PENUNDAAN DISERTAI MODIFIKASI YG BERTUJUAN MEMPERBESAR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI**

TAAT (COMPLIANCE)

- **IMPLEMENTATOR MENJALANKAN IMPLEMENTASI TANPA DISERTAI DENGAN PERUBAHAN TERHADAP ISI DAN MEKANISME IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERSEBUT**

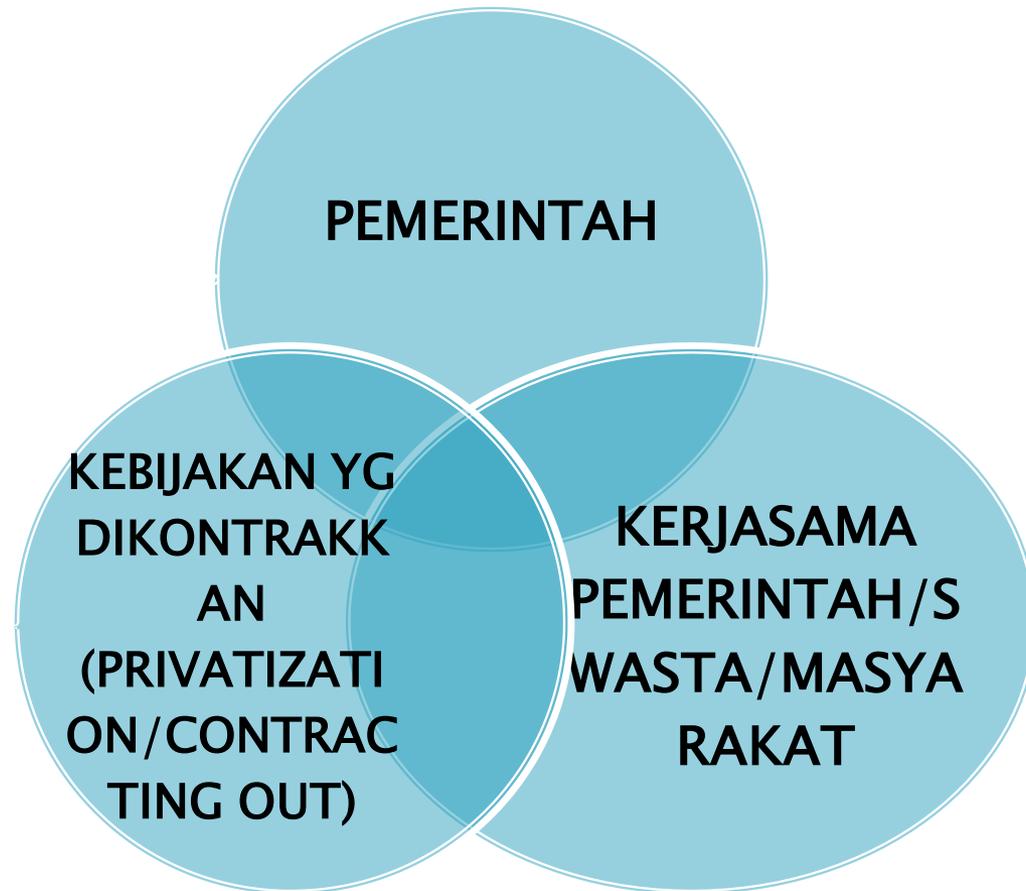
5 TEPAT DALAM IMPLEMENTASI



TEPAT KEBIJAKANNYA

- ▶ *HOW EXCELLENT IS THE POLICY* (BERMUATAN HAL-HAL UTK MEMCAHKAN MASALAH YG HENDAK DIPECAHKAN)
- ▶ DIRUMUSKAN SESUAI DGN KARAKTER MASALAH YG HENDAK DIPECAHKAN
- ▶ DIBUAT OLEH LEMBAGA YG MEMILIKI KEWENANGAN (MISI KELEMBAGAAN) YG SESUAI DGN KARAKTER KEBIJAKANNYA

TEPAT PELAKSANAANYA



TEPAT TARGET

**SESUAI YG DIRENCANAKAN
(TDK TUMPANG TINDIH**

**TARGET DLM KONDISI
SIAP UNTUK DIINTERVENSI**

**INTERVENSI BERSIFAT
BARU / MEMPERBAHARUI**

TEPAT LINGKUNGAN

LINGKUNGAN INTERNAL

- PUBLIC OPINION
- INTERPRETATIVE INSTITUTION (MEDIA, LSM, KELOMOK LAINNYA)
- INDIVIDUAL (MEMAINKAN PERAN PENTING)

LINGKUNGAN EKSTERNAL

- SUMBER OTORITAS KEBIJAKAN
- JEJARING ORGANISASI YG TERLIBAT
- BARGAINING ANTARA PEMILIK OTORITAS&JEJARING

TEPAT PROSES

**MASYA&PEMERINTAH MEMAHAMI
KEBIJAKAN**

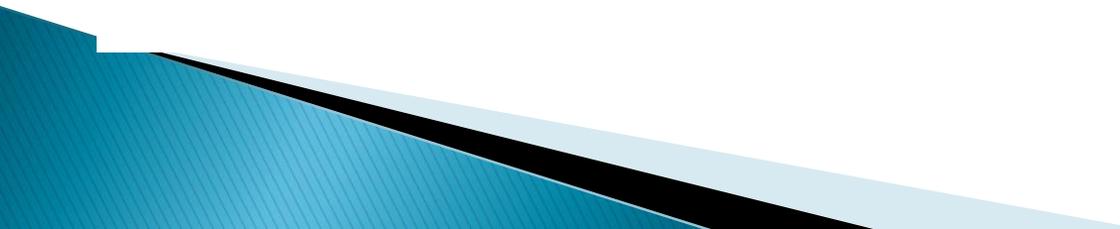


**MASYA&PEMERINTAH MENERIMA
KEBIJAKAN**



**MASYA&PEMERINTAH MENJADI BAGIAN
DARI KEBIJAKAN**

MEMAHAMI KEBIJAKAN (POLICY ACCEPTANCE)

- ❑ **PUBLIK MEMAHAMI SEBAGAI SEBUAH “ATURAN MAIN” YG DIPERLUKAN UNTUK MASA DEPAN**
 - ❑ **PEMERINTAH MEMAHAMI SEBAGAI TUGAS YG HARUS DILAKSANAKAN**
- 

MENERIMA KEBIJAKAN (POLICY ADOPTION)

- ▶ **PUBLIK MENERIMA SEBAGAI “SEBUAH “ATURAN MAIN” YG DIPERLUKAN UNTUK MASA DEPAN**
- ▶ **PEMERINTAH MENERIMA SEBAGAI TUGAS YG HARUS DILAKSANAKAN**

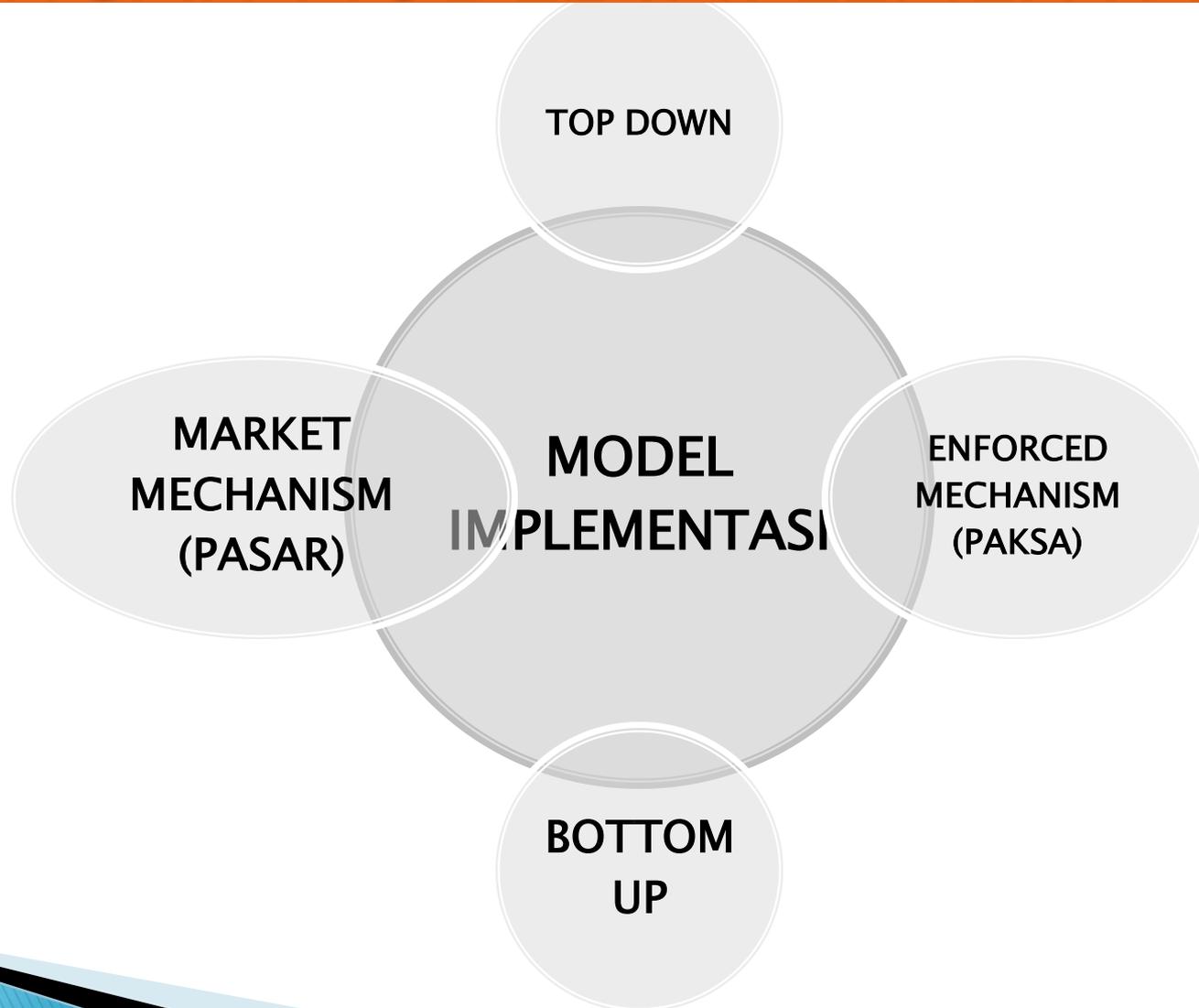
BAGIAN DARI KEBIJAKAN (STRATEGIC READINESS)

- ▶ **PUBLIK SIAP
MELAKSANAKAN/MENJADI
BAGIAN DARI KEBIJAKAN**
- ▶ **BIROKRAT SIAP MENJADI
PELAKSANA KEBIJAKAN**

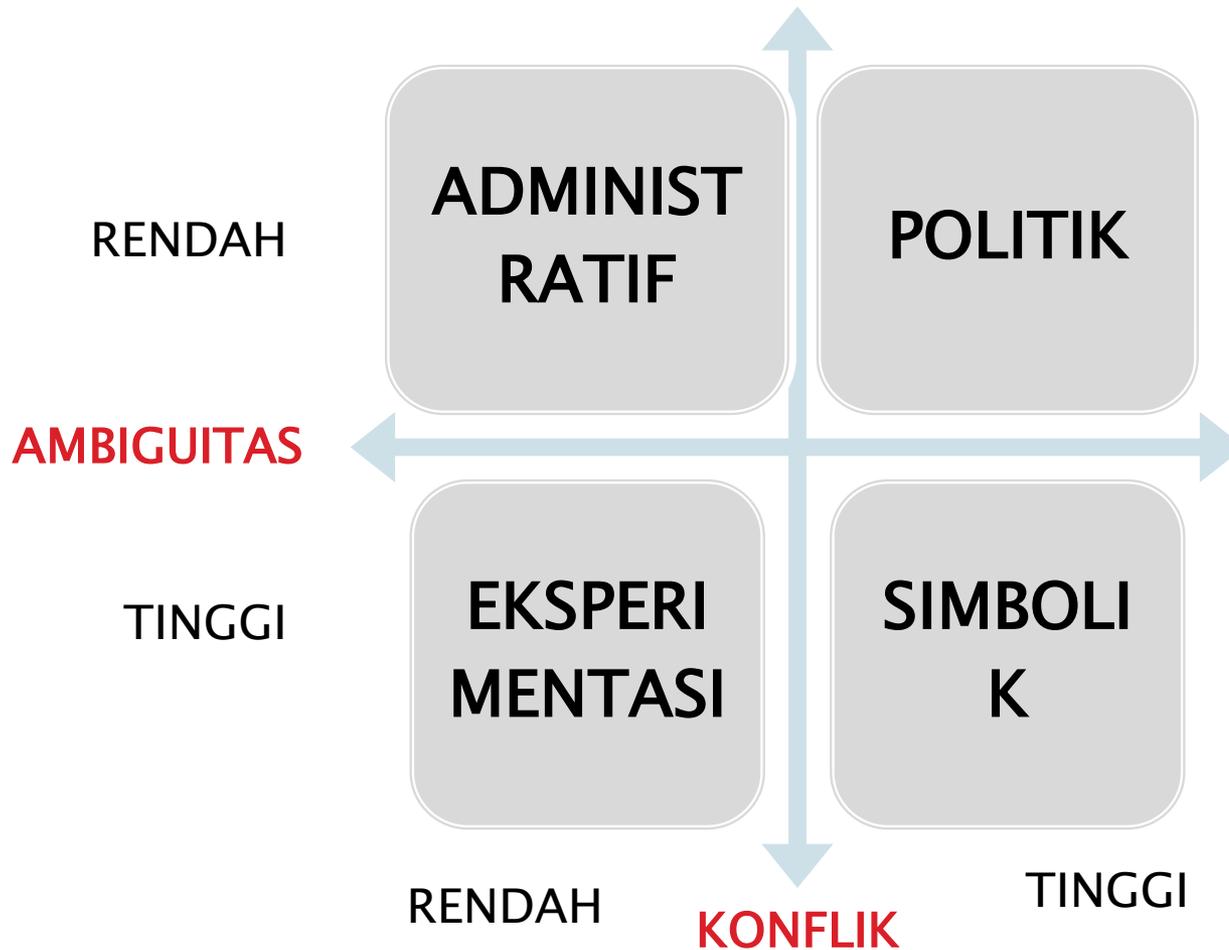
DUKUNGAN

- ▶ **POLITIS,**
 - ▶ **STRATEGIS,**
 - ▶ **TEHNIS**
- 

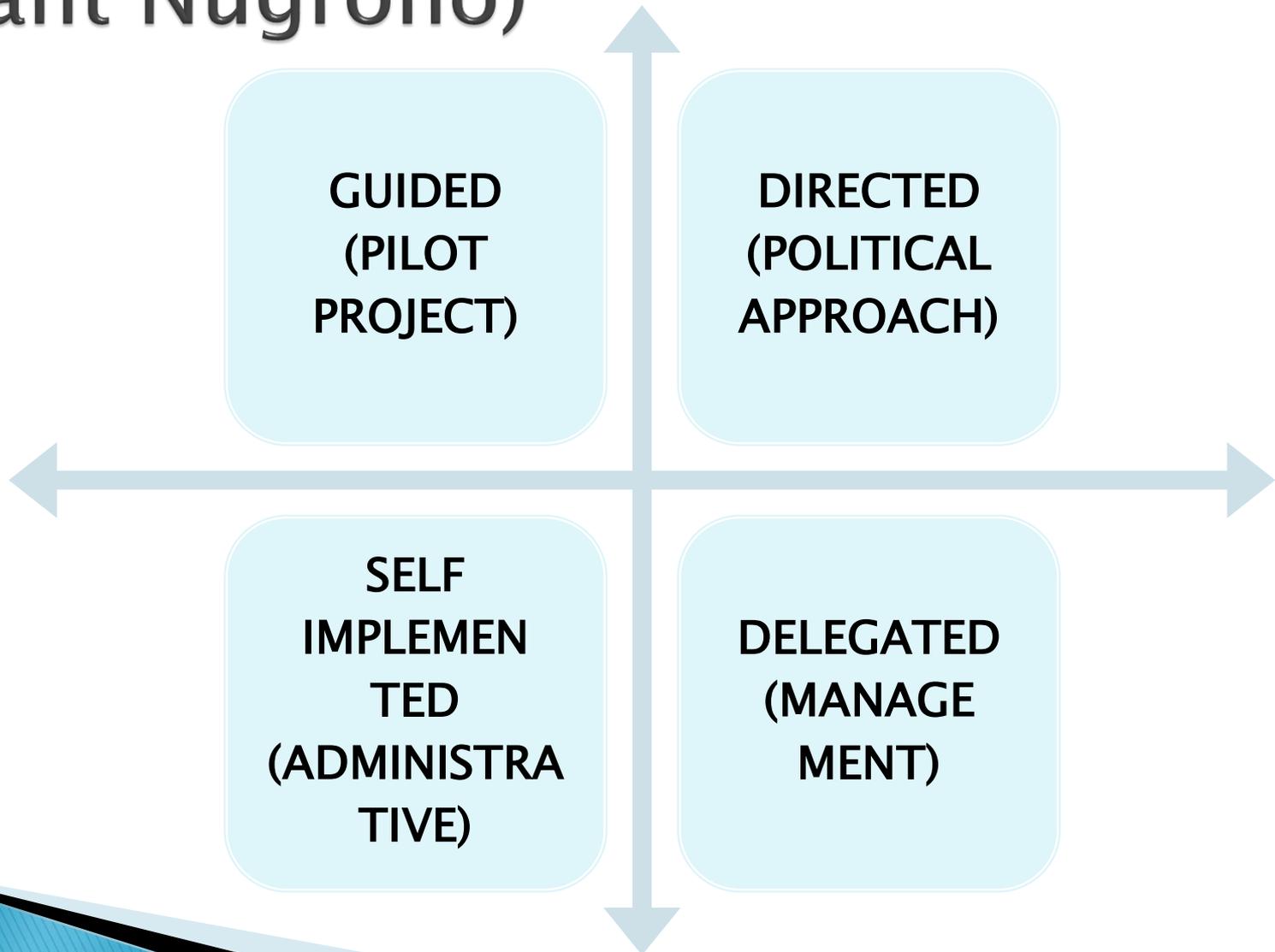
HUB KARAKTER KEBIJAKAN DENGAN MODEL IMPLEMENTASI



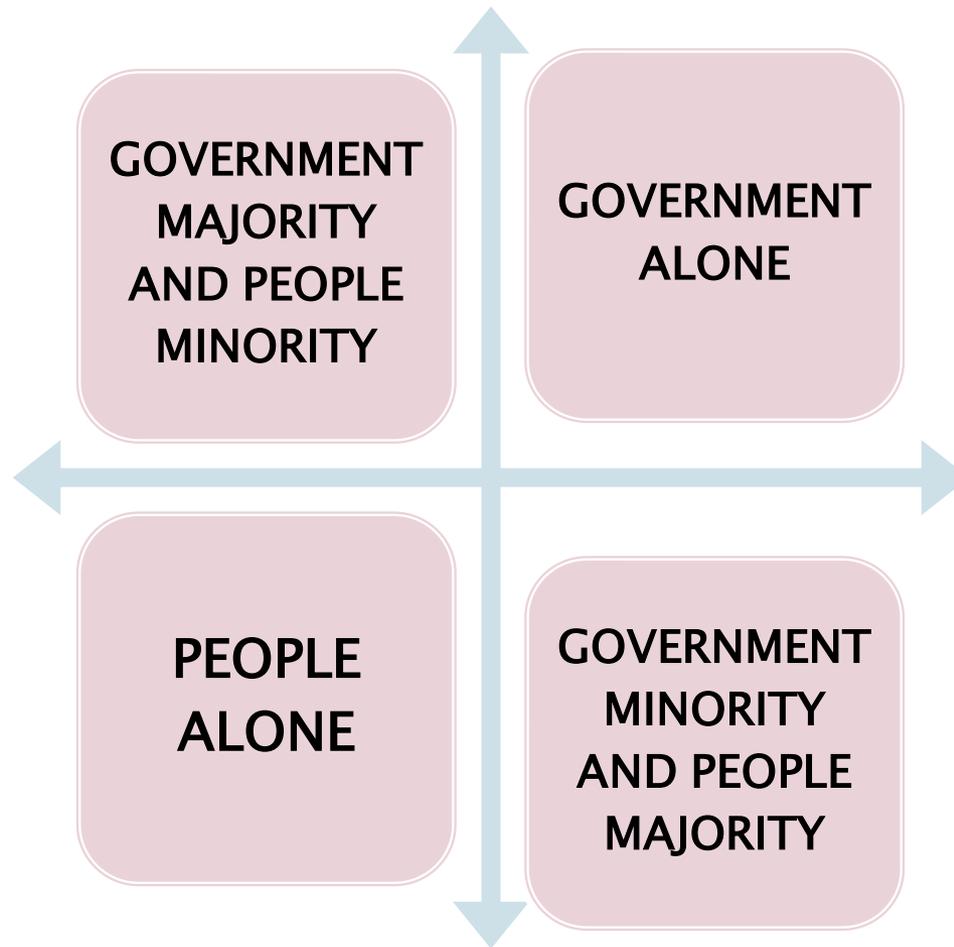
**GAMBAR : MATRIK AMBIGUITAS-KONFLIK
(Richard Matland) sebagai model implementasi yg
efektif**



Model implementasi kebijakan (Riant Nugroho)



Aktor implementasi kebijakan



Kegagalan implementasi

A. Tak bisa diimplementasikan

B. Unsuccessful implementation

PENYEBAB KEGAGALAN KEBIJAKAN:

1. **Bad policy** : perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan dsb
2. **Bad implementation** : pelaksana tak memahami juklak, terjadi implementation gap dsb)
3. **Bad Luck**

Kegagalan implementasi

- ▶ **BAD MANAJERIAL** : Berhasil ditetapkan, tidak dpt dilaksanakan
- ▶ **BAD ADMINISTRASI** : Berhasil ditetapkan, dapat dilaksanakan, pelaksanaan perlu biaya besar
- ▶ **BAD DESAIN** : Berhasil dilaksanakan, tidak sesuai design
- ▶ **BAD THEORY** : Berhasil dilaksanakan, tidak memberi hasil yang diharapkan

KEGAGALAN IMPLEMENTASI

MORGAN (PARSON,2006)

1. **METAFORA MESIN** : akibat ddr rantai komando yg buruk (problem dgn struktur dan peran)
2. **METAFORA DOMINASI** :(akibat dari konflik manajemen/tenaga kerja)
3. **METAFORA FISIK** : akibat dr kekuatan bawah sadar (groupthink)/pertahan ego/insting seksual yg ditekan

1. **METAFORA ORGANISME** : akibat dari relasi manusia atau lingkungan
 2. **MATAFORA OTAK** : akibat dari arus informasi yg buruk/problem belajar
 3. **METAFORA KULTUR** ; akibat dari kultur organisasi
 4. **METAFORA KEKUASAAN** : akibat dari kekuasaan didalam dan disekitar proses implementasi
- 